



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS TIDAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GIRI ATMOKO**
2. Jabatan : **KEPALA BAKP**
3. NHK : **252719**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.291.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/120 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 1120 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 100.500.000
3. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 90.500.000
4. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 155.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO A1FO2N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 24.150.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 402.516.927

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 99.850.000

**Sub Total** Rp. 1.973.016.927



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.973.016.927

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.